

BAB 3

PERAN IEYASU DALAM *KESHOGUNAN* TOKUGAWA

3.1 Peran Ieyasu dalam Pembentukan Sistem Tokugawa

Hall (1991) menjelaskan di bukunya bahwa pada bulan Agustus tahun 1598, Toyotomi Hideyoshi meninggal. Hideyoshi lebih mementingkan penyerangannya yang ceroboh ke Korea dibandingkan dengan pengukuhan sistem politik di dalam negeri, yang hasilnya struktur politik pemerintahannya runtuh ketika ia meninggal. Kekuatan politik kemudian pada saat itu berpusat kepada dua orang, yaitu Tokugawa Ieyasu dan Ishida Mitsunari.

Masalah yang dihadapi oleh Ieyasu ketika Toyotomi Hideyoshi meninggal adalah menghancurkan faksi Mitsunari dan menyatukan seluruh negeri dibawah kekuasaannya. Kesempatan untuk melakukan hal ini muncul lebih cepat dari yang diduga, dan dia berhasil mencapai tujuannya pada pertempuran di Sekigahara pada tahun 1600. Totman (1995) menulis dalam bukunya bahwa pada tahun 1603 kemudian ia ditunjuk menjadi Shogun, dengan gelar *sei taishōgun*⁹ yang berarti “Jenderal yang berhasil menaklukkan kaum barbar” oleh kaisar, dan dengan mendapatkan gelar itu, artinya tidak ada *daimyō* lain yang bisa melawannya, ia kemudian mendirikan markasnya, *bakufu*, di Edo, yang berada di pusat wilayah kekuasaannya di Kantō. Hal-hal yang tersisa yang harus dilakukan oleh Ieyasu pada saat itu antara lain adalah untuk menyingkirkan Toyotomi Hideyori, pewaris dari Toyotomi Hideyoshi, yang berada di Osaka, dan juga memperkuat pengaruh keluarga Tokugawa di *keshogunan* agar *keshogunan* bisa diwariskan hanya untuk keluarga Tokugawa.

Pada awalnya Ieyasu tampaknya ingin memasukkan Toyotomi Hideyori ke dalam sistem-sistem politik Tokugawa sebagai salah satu *daimyō*. Tetapi, menurut Nakane, Totman dan Ōishi (1990) akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Hideyori di Osaka pada musim dingin tahun 1614 dan musim panas 1615, mengakibatkan kematian Hideyori dan bangkrutnya keluarga Toyotomi. Hasilnya adalah, kekuatan militer yang tadinya merupakan ancaman bagi keluarga

⁹ *sei tai shōgun* secara harafiah berarti jenderal besar penakluk kaum barbar. Ini adalah gelar yang diberikan oleh kaisar dan orang yang menyandang gelar ini memiliki kekuasaan yang tertinggi di Jepang. Dikutip dari *Japan An Illustrate Encyclopedia*, 1993, halaman 1406.

Tokugawa saat itu menghilang dan tidak ada lagi yang bisa mengancam pemerintahan Tokugawa.

Satu hal lagi yang harus Ieyasu lakukan adalah untuk membuat posisi *shogun*, penguasa tertinggi, agar hanya menjadi milik keluarga Tokugawa saja, dan hanya bisa diwarisi didalam keluarga saja. Oda Nobunaga memiliki pewaris, akan tetapi bawahannya Toyotomi Hideyoshi yang kemudian mewarisi kekuasaannya, dan ketika Hideyoshi meninggal, meskipun Hideyori masih hidup, bawahannya, Tokugawa Ieyasu yang pada akhirnya mewarisi kekuasaan politiknya. Karena kejadian seperti ini, Ieyasu harus memikirkan berbagai cara untuk memastikan agar *keshogunan* hanya menjadi milik keluarga Tokugawa saja. Kurang dari tiga tahun setelah ia menerima gelar *shogun*, Ieyasu mengundurkan diri dan mewariskan posisi itu ke anaknya, Hidetada. Ia kemudian mengundurkan diri dari pemerintahan, tetapi tetap mengatur permasalahan politik dari balik layar. Sistem pemerintahan dari balik layar ini dinamakan *ōgoshō*. Ieyasu telah memindahkan gelar Shogun kepada Hidetada dan memberikan tugas-tugas *shogun* kepadanya agar seluruh Jepang bisa melihat bahwa *keshogunan* adalah gelar yang dimiliki dan diwariskan hanya untuk keluarga Tokugawa saja.

Ieyasu telah berhasil menjadikan *keshogunan* hanya untuk milik keluarganya saja, tetapi ia harus tetap memikirkan tentang ahli waris yang tepat dan keputusan-keputusan untuk beberapa anaknya. Ia memiliki sebelas anak, dan putranya yang ke tiga, Hidetada-lah yang mewarisi gelar *shogun*. Sejarawan yang bernama Bodart-Bailey (2006) mengungkapkan bahwa anak sulung Ieyasu, Nobuyasu, dinikahkan dengan anak perempuan Nobunaga yang bernama Tokuhime, tetapi kemudian Nobunaga mencurigai keterlibatan Nobuyasu dalam persekongkolan dengan musuhnya, Takeda dan mengharuskan Nobuyasu bunuh diri pada tahun 1579. Anak kedua Ieyasu, Hideyasu di adopsi oleh Hideyoshi dan menjadi ahli waris keluarga Yuki, sebuah keluarga yang ternama di wilayah Kantō. Menurut data yang didapat dari Nakane, Totman dan Ōishi (1990), pada tahun 1600 ia mewarisi nama Tokugawa dan menjadi penguasa Echizen yang sekarang di Utara wilayah Fukui dengan pendapatan 670.000 *koku*. Hideyasu masih hidup pada tahun 1605, ketika Hidetada menjadi *shogun*, dan tidaklah aneh kalau seharusnya dialah yang menjadi *shogun* dibandingkan Hidetada.

Pada saat itu, pewarisan keluarga militer seharusnya diwariskan kepada anak yang paling tua, tetapi akibat pengaruh dari pertempuran antar wilayah dan perebutan kekuasaan yang terjadi sebelum itu masih sangat kuat, maka cara memilih ahli waris adalah didasari oleh ahli waris yang cocok dan memiliki kemampuan yang paling hebat, cara inilah yang dilakukan oleh Tokugawa Ieyasu. Ada yang mengatakan alasan Ieyasu memilih Hidetada adalah karena Hidetada merupakan anak yang paling penurut dibandingkan anak-anak yang lain, ia juga yang paling menerima rencana Ieyasu, untuk memerintah dari belakang layar setelah ia mengundurkan diri dari pemerintahan, sehingga Ieyasu menganggap Hidetada merupakan pilihan yang paling logis, akan tetapi apabila cara seperti ini terus dilakukan, keluarganya akan terpecah belah, seperti yang terjadi kepada *keshogunan* Ashikaga, begitu juga dengan beberapa keluarga penguasa lainnya yang telah terjadi di masa lalu. Apabila hal ini terjadi kepada keluarga Tokugawa, kekuasaan keluarga Tokugawa di *keshogunan* akan terancam.

Ieyasu berhasil memecahkan masalah keluarganya ini, mengenai ahli waris, ketika ada pertanyaan yang timbul mengenai pewaris Hidetada. Hidetada memiliki tiga putra, yang sulung, Iemitsu, yang kedua, Tadanaga, dan yang ketiga, Masayuki. Dari ketiga anak itu, Iemitsu dan Tadanaga merupakan anak dari istri pertama Hidetada, Oeyo (yang merupakan adik dari Yodogimi, selir favorit Toyotomi Hideyoshi). Masayuki lahir dari seorang selir, dan ketika ia lahir, ia diserahkan ke keluarga Hoshina sebagai anak angkat.

Ahli waris *shogun* ketiga kemudian berada diantara Iemitsu dan Tadanaga. Anaknya yang sulung, Iemitsu, sejak kecil tidak terlihat menjanjikan, dan tampak bodoh. Di lain pihak, Tadanaga sangat cerdas dan menjanjikan. Ibunya sangat menyayanginya, dan karena dukungan dari ibunya, ayahnya dan petinggi keluarga Tokugawa semuanya lebih memilih Tadanaga sebagai *shogun* ke tiga. Keadaan ini membuat ibu menyusui Iemitsu merasa kecewa, dan ia secara langsung mengadakan hal ini kepada Ieyasu. Ieyasu datang dari rumah pensiunnya di Sumpu ke Edo dan kemudian menunjuk Iemitsu sebagai ahli waris Hidetada.

Pada akhirnya sistem pewarisan kepada anak sulung pun tertanam didalam keluarga Tokugawa. Ieyasu berpikir dibandingkan memilih ahli waris berdasarkan kemampuan dan sifat, tujuannya untuk mempertahankan kekuasaan keluarga

Tokugawa akan lebih mudah tercapai apabila kelahiran menjadi faktor penentu ahli waris. Hal ini akan memastikan berlanjutnya rezim Tokugawa.

Selain memastikan sistem ahli waris ini berjalan, Ieyasu berusaha untuk menanamkan pemikiran bahwa *shogun–shogun* di masa depan akan memiliki kekuasaan yang lebih di atas saudara-saudaranya. Berdasarkan data yang ditulis oleh Nakane, Totman dan Ōishi (1990: 20) dapat diketahui bahwa setelah menunjuk Iemitsu sebagai *shogun*, Ieyasu menulis surat peringatan untuk Oeyo yang berbunyi : “*Daimyō* memandang anak tertua yang paling penting. Anak yang lebih muda dianggap sebagai pelayan... Jika anak kedua memiliki pengaruh yang lebih besar dan lebih menonjol dari anak pertama, maka hal inilah yang akan menjadi akar dari permasalahan di dalam keluarga.” Ieyasu sadar betul setelah melihat berbagai macam keluarga *daimyō*, penguasa dan keluarganya sendiri, bahwa yang paling penting untuk dijaga adalah hubungan antar saudara.

Kekhawatiran ini terlihat jelas dari perlakuan Ieyasu dan Hidetada kepada saudara-saudara Hidetada. Dari buku yang ditulis oleh Nakane, Totman dan Ōishi (1990) terlihat bahwa kakak laki-laki Hidetada, Hideyasu meninggal pada tahun 1607 pada umur tiga puluh empat tahun, dan anaknya yang bernama Tadano yang mewarisi jabatannya sebagai penguasa Fukui. Tadano berselisih dengan Hidetada tidak lama setelah Ieyasu meninggal, dan pada tahun 1623 wilayahnya disita, dan ia diasingkan ke Bungo. Perlakuan yang tidak semestinya menjadi alasan atas hukumannya, tetapi segera setelah itu, posisi *shogun* diwariskan oleh Hidetada kepada Iemitsu. Tampaknya Hidetada menganggap garis keturunan kakaknya merupakan sebuah masalah yang patut di khawatirkan, dan ada juga kemungkinan apabila Hideyasu tidak meninggal, ia bisa saja mencoba untuk merebut posisi *shogun* kedua dari Hidetada setelah meninggalnya Ieyasu.

Menurut pengurutan sejarah yang dilakukan oleh Nakane, Totman dan Ōishi (1990) putra keempat dan kelima Ieyasu tidak menimbulkan masalah, keduanya meninggal pada tahun 1608 dan 1602. Pada tahun 1610, anak keenam, Tadateru, menjadi pemimpin yang paling berkuasa di wilayah Utara Jepang, sebagai *daimyō* wilayah Takada di Provinsi Echigo yang sekarang adalah Prefektur Niigata, dimana dia memiliki wilayah bernilai 600.000 *koku*. Tadateru memiliki emosi yang labil, ia sangat mudah marah dan melakukan beberapa tindakan semena-

mena, dan pada tahun 1615 Ieyasu marah karena keterlibatan Tadateru ketika salah satu anak buahnya membunuh salah satu bawahan *shogun* (*hatamoto*). Pada tahun 1616, Tadateru di asingkan ke Asama di Ise; lalu kemudian ia dikirim ke Hida (sekarang adalah bagian Utara Prefektur Gifu), dan pada tahun 1626 ia diserahkan dibawah pengawasan *daimyō* Suwa di Shinshu.

Walaupun Tadateru mengirimkan petisi agar dirinya diampuni, ia tidak pernah dimaafkan. Ia terus berstatus tahanan rumah selama lima puluh delapan tahun hingga ia meninggal pada umur sembilan puluh dua tahun. Tentu saja masalah utama disini adalah emosi yang tidak terkendali Tadateru, akan tetapi perlakuan dari *bakufu* yang ia terima tampaknya didasari karena mereka menganggap adanya sebuah individu dengan pengendalian emosi yang buruk berada di lingkaran *keshogunan* dapat merusak kestabilan pemerintahan Tokugawa.

Putra ketujuh dan kedelapan Ieyasu keduanya meninggal pada saat masih kecil. Putranya yang kesembilan, Yoshinao, diberikan wilayah di Nagoya di Owari, putra kesepuluhnya di Wakayama, di Provinsi Kishu atau disebut juga dengan Provinsi Kii (sekarang menjadi Prefektur Wakayama), dan ke sebelas di Mito di Hitachi. Ketiga anak ini menjadi pembentuk *gosanke*, rumah pelayan terbesar bagi *Bakufu* Tokugawa. Dari ketiga putra Ieyasu ini, Yoshinaolah yang paling dekat umurnya dengan Hidetada, meskipun jarak umur antara keduanya mencapai lebih dari dua puluh tahun.

Disamping itu, Nakane, Totman dan Ōishi (1990) menjelaskan bahwa adik Iemitsu, Tadanaga, yang sejak kecil menjadi rivalnya dalam memperebutkan posisi *shogun*, dijadikan *daimyō* atas wilayah bernilai 500.000 *koku* yang berpusat di Fuchu di provinsi Suruga. Tadanaga menjadi terkenal sebagai penasehat dari Suruga, tetapi setelah beberapa bulan setelah ayahnya meninggal pada tahun 1632, Iemitsu menyita wilayahnya, dan memerintahkannya untuk bunuh diri. Kebijakan untuk memusnahkan siapapun yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas pemerintahan *keshogunan* seperti ini terus dijalankan oleh Iemitsu yang memerintah hingga kematiannya pada tahun 1651.

3.2 Penyempurnaan Sistem Pemerintahan Tokugawa

Dapat dikatakan bahwa pembangunan sistem pemerintahan Tokugawa, yaitu sistem *Bakuhan*¹⁰, telah selesai ketika Iemitsu berkuasa dimana ia menghimpun seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pendahulunya dan menjadikannya satu. Langkah utama yang ia lakukan adalah memanipulasi para *daimyō*, mengatur kekaisaran, mengatur hubungan dengan negara luar, dan mensakralkan legenda keluarga Tokugawa.

Karakteristik yang penting dari pemerintahan *Bakuhan* milik Tokugawa adalah meletakkan *daimyō*, yang tadinya memiliki kedudukan yang seimbang dengan Tokugawa, menjadi bawahan mereka. Untuk mencapai hal ini, hasil dari kemenangan di peperangan Sekigahara dimanfaatkan betul-betul oleh Tokugawa. Dari data yang diperoleh dari Nakane, Totman dan Ōishi (1990) dapat diketahui bahwa Ieyasu menyingkirkan keluarga-keluarga militer yang berkuasa pada saat itu, seperti keluarga Ukita Hideie, Chōsokabe Morichika, dan beberapa keluarga yang lain yang menjadi lawannya pada pertempuran Sekigahara, yang seluruhnya berjumlah 91 keluarga, dan menyita kepemilikan mereka, yang totalnya mencapai lebih dari 4.200.000 *koku*. Sebagai tambahan, empat keluarga, termasuk didalamnya Mōri Hidenari dan Uesugi Kagekatsu, menyaksikan lebih dari 2.210.000 *koku* kepemilikan mereka disita. Dengan tolak ukur ini, Ieyasu berhasil menguasai wilayah yang berharga lebih dari 6.420.000 *koku*, yang ia pergunakan untuk memperkuat kekuasaan politiknya. Ia membagi-bagikan wilayah yang ia sita kepada para tuan tanah yang berpihak kepadanya sewaktu terjadi pertempuran di Sekigahara, dan juga kepada para pengikutnya. Selain membagikannya, ia juga menggunakan hal ini untuk memindahkan para *daimyō* dari wilayah asalnya ke wilayah baru yang ia bagi-bagikan untuk memperlemah posisi *daimyō* tersebut.

Tindakan penyingkiran para *daimyō* dan juga pemindahan ke wilayah lain, dijalankan oleh tiga *shogun* pertama, yang tidak hanya dijalankan sewaktu masa perang tetapi juga pada masa damai. Menurut Nakane, Totman dan Ōishi (1990) Iemitsu merupakan Shogun yang paling agresif dalam melakukan pemindahan *daimyō* ini, yang berakibat semakin berkurangnya para penguasa *tozama*, yaitu keluarga-keluarga yang bukan pengikut Tokugawa pada tahun 1600, dan

¹⁰ *Bakuhan* adalah sistem pemerintahan yang dipakai Tokugawa dimana *daimyō-daimyō* yang menjadi bawahannya diberikan wilayah (*han*). Dikutip dari Jansen, 1995, halaman 147.

meningkatnya jumlah *daimyō* yang keluarganya merupakan pengikut Tokugawa, disebut juga dengan *fudai*.

Seorang penguasa dapat kehilangan sebagian atau bahkan seluruh wilayah kekuasaannya karena gagal mempertahankan ketertiban dan keamanan di wilayahnya, tetapi penyebab yang paling umum dari kehilangan wilayah ini adalah karena tidak adanya penerus, pewaris, atau keturunan di dalam keluarga *daimyō* tersebut. Pada dasarnya, sebuah wilayah diberikan oleh *shogun* kepada seseorang yang ditunjuknya secara langsung. Apabila seorang *daimyō* tidak memiliki pewaris, tanahnya akan dikembalikan ke *shogun*. Ada banyak peristiwa dimana seorang *daimyō* kehilangan wilayahnya akibat tidak memiliki keturunan. Hal ini bahkan terjadi pada beberapa anak Ieyasu. Anaknyanya yang keempat, Tadayoshi dan kelima, Nobuyoshi merupakan *daimyō* di wilayah Kiyosu di Owari dan Mito di Hitachi, tetapi keduanya meninggal tanpa adanya pewaris, dan wilayah mereka pun disita. Karena hal ini, keluarga dari tuan tanah yang baru meninggal ini pun mendadak tidak memiliki rumah dan terbuang begitu saja ke dunia yang kejam. Hal seperti inilah yang melahirkan para *rōnin*¹¹ dan juga masalah-masalah yang timbul mengikuti kemunculan mereka.

Meskipun apabila seorang *daimyō* memiliki ahli waris, pewarisan tidak terjadi secara otomatis. Karena sang pewaris harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan formal dari pemerintahan *bakufu* sebelum dia berhak menjadi pewaris wilayah tersebut. Seringkali pemerintahan *bakufu* menolak pewaris yang dipilih secara terburu-buru setelah kematian tak terduga seorang *daimyō*. Akan tetapi karena banyaknya keluarga *daimyō* yang tidak memiliki pewaris dilenyapkan, masalah yang timbul akibat munculnya para *rōnin* semakin banyak. Menurut Nakane, Totman, & Ōishi (1990) sebagai akibatnya, pemerintahan *bakufu* pada tahun 1651 memutuskan untuk menerima pewaris yang diadopsi pada saat-saat terakhir, praktik ini kemudian dikenal dengan sebutan “adopsi darurat.”

Hall (1991) menyatakan dalam bukunya bahwa langkah yang paling penting untuk memastikan pada *daimyō* tetap berada dibawah kendali pemerintahan adalah dengan diadopsinya hukum *buke shohatto* (hukum yang berlaku untuk

¹¹ Pengertian *rōnin* sejak Periode Muromachi mengacu pada *samurai* yang kehilangan pemimpinnya dan gaji mereka. Dikutip dari *Japan: An Illustrate Encyclopedia*, 1993, halaman 377.

keluarga militer). Nakane, Totman, & Ōishi (1990) mengemukakan bahwa pada tahun 1615, beberapa minggu setelah penghancuran Toyotomi Hideyori, Ieyasu mengumpulkan para *daimyō* dan mensosialisasikan tiga belas pasal yang berlaku bagi mereka. Isinya antara lain larangan untuk memperbaiki istana, untuk mengadakan pernikahan harus terlebih dahulu meminta izin kepada Tokugawa, dan sebagainya. Hukum-hukum inilah yang menjadi asal mulanya *buke shohatto*. Pada tahun 1635, *shogun* ketiga, Iemitsu, menyusun ulang dan mengembangkan ketiga belas pasal ini, menjadi delapan belas pasal. Hukum ini merupakan basis dari peraturan-peraturan yang berlaku bagi para *daimyō*. Mekanisme pengendalian pemerintahan *bakufu* terhadap para *daimyō* adalah hukum-hukum ini, dan juga peraturan agar istri dan anak mereka tetap tinggal di Edo, dan juga sistem *sankin kōtai* yang dilembagakan pada tahun 1634 dan 1635.

Sankin kōtai, yaitu tradisi seorang *daimyō* mengunjungi istana *shogun* di Edo telah mulai sejak beberapa dekade sebelumnya. Banyak diantara mereka yang melewati rute Tōkaidō untuk mengunjungi *shogun*, dan sudah tradisi bagi *shogun* untuk menerima dan berpisah dengan mereka di Shinagawa, tempat peristirahatan pertama yang terletak di selatan Edo. Menurut Nakane, Totman, & Ōishi (1990) di dalam dokumen yang ditemukan di kuil Myōkokuji didekat tempat peristirahatan Shinagawa terdapat sebuah catatan yang berjudul “Kunjungan-Kunjungan Shogun Ketiga,” dan catatan terakhirnya pada tanggal 11 November 1635, kunjungan ke-44 Iemitsu. Setelah itu, pencatatan kunjungan menjadi tanggung jawab para *daimyō*, *shogun* tidak perlu lagi pergi ke Shinagawa untuk menjemput ataupun mengantar para *daimyō*.

Langkah penting berikutnya untuk mengatur para *daimyō* adalah pengaturan hubungan pemerintahan *bakufu* dengan kekaisaran. Toyotomi Hideyoshi berhasil menguasai seluruh wilayah, akan tetapi dia mengatur seluruh wilayah sebagai wakil kaisar, status resmi yang ia terima langsung dari kekaisaran. Sehingga ketika dia mengadakan survey keseluruhan wilayah kekuasaannya, ia menyerahkan beberapa hasil laporan kepada kaisar, yang merupakan pemilik wilayah yang paling berkuasa untuk persetujuan. Tokugawa menjalankan kebijakan yang berlawanan dengan Toyotomi, pemerintahan Tokugawa memosisikan dirinya dimana kekaisaran dan seluruh wilayah berada di bawah pengawasan *bakufu*.

Nakane, Totman, & Ōishi (1990) menjelaskan bahwa Tokugawa menjalankan kebijakan ini termasuk di dalam hubungannya dengan kekaisaran, pertama dengan mengeluarkan peraturan yang mengatur kekaisaran dan para bangsawan (*kinchu narabi ni kuge shohatto*) yang memiliki posisi yang seimbang dengan *buke shohatto*.

Nakane, Totman, & Ōishi (1990) juga menyatakan bahwa seperti *buke shohatto*, Ieyasu mensahkan hukum ini ketika Hideyori dan Ibunya Yodogimi meninggal di istana Osaka pada tahun 1615. Menurut Nakane, Totman, & Ōishi (1990) hukum-hukum ini semuanya berjalan bersamaan seperti hukum untuk para bangsawan "*kuge shohatto*" (公家諸法度), hukum penghargaan gaun ungu "*chokkyo shie hatto*" (勅許紫衣法度) yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya, dan penambahan beberapa peraturan yang mengatur kedudukan kaisar. Beberapa isi dari *kuge shohatto* antara lain: (1) Bangsawan harus mendedikasikan diri mereka untuk belajar sesuai dengan tradisi kekaisaran; (2) Bagi mereka yang melanggar peraturan berperilaku akan diasingkan; (3) Seseorang tidak boleh lalai dengan tugas-tugas sehari-hari mereka; (4) Seseorang tidak boleh berjalan-jalan dengan bebas di dalam kota; (5) Pelayan yang terlibat di dalam perjudian ataupun tindakan-tindakan yang tidak pantas tidak boleh dipekerjakan.

Bisa disimpulkan bahwa hak untuk mengatur dan menghukum para bangsawan terletak ditangan kekuasaan militer. Selain itu ada "Hukum penghargaan gaun ungu" berkenaan dengan pemberian gaun ungu bagi orang-orang yang telah mencapai tingkat tertinggi dari pendeta Buddha. Pada awalnya pemberian penghargaan ini berada dibawa kepengurusan kekaisaran, akan tetapi setelah dikeluarkannya *chokkyo shie hatto*, kekaisaran harus terlebih dulu mendapatkan persetujuan dari pemerintahan *bakufu* untuk memberikan penghargaan semacam ini.

Nakane, Totman, & Ōishi (1990) kemudian menjelaskan lebih jauh bahwa *Kinchu narabi ni kuge sho-hatto* yang dikeluarkan pada tahun 1615 terdiri atas tujuh belas pasal. Isinya antara lain Pasal I menyatakan bahwa tugas utama dari kaisar adalah belajar. Perbedaan fungsi antara kekaisaran dan *bakufu* sangat jelas: Urusan politik merupakan tanggung jawab pemerintahan *bakufu*, sedangkan pendidikan merupakan fungsi utama kekaisaran. Pasal ke II dan ke III mengatur

kedudukan pangeran, bangsawan, dan pensiunan petugas kekaisaran. Pasal IV dan V mengatur janji pertemuan dengan kaisar lebih didasari oleh kemampuan individual seseorang dibandingkan latar belakang keluarganya. Pasal ke VII mengatur tingkatan di dalam militer tidak ada kaitannya sama sekali dengan tingkatan kebangsawanan dan semuanya diatur oleh pemerintahan *bakufu*.

Apabila seluruh tujuh belas pasal dijalankan secara ketat, kekaisaran dan para bangsawan akan sepenuhnya berada dibawah kekuasaan *bakufu*. Akan tetapi hubungan antara pemerintahan *bakufu* dengan kekaisaran tidak berjalan semulus seperti yang dibayangkan oleh Tokugawa Ieyasu. Dari buku yang ditulis oleh Nakane, Totman, & Ōishi (1990) dapat diketahui bahwa pada tahun 1615, rencana Ieyasu agar kaisar Gomizuno-o (後水尾) menikah dengan putri Hidetada, Kazuko, bisa direalisasikan, akan tetapi langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan hal ini menimbulkan kebencian dari pihak Gomizuno-o dan pengikutnya yang kemudian berujung kepada “insiden gaun ungu” (*shie chokkyo jiken* 紫衣勅許事件) dan pengunduran dirinya pada tahun 1629. Insiden ini berkaitan dengan pelepasan gelar beberapa pendeta yang telah diberikan penghargaan gaun ungu oleh kaisar. Pemerintahan *bakufu* menganggap bahwa penghargaan yang dilakukan ini melanggar hukum mengenai perilaku dan fungsi kaisar dan bangsawan. Empat orang biksu, termasuk pendeta kuil Daitokuji, Takuan, memprotes keputusan ini dan kemudian diasingkan.

Berdasarkan pengurutan sejarah oleh Nakane, Totman, & Ōishi (1990) dapat diperoleh data bahwa dalam keadaan yang tegang ini, Iemitsu mengunjungi Kyoto tiga kali: Pada tahun 1623, 1626, dan 1634. Dan pada setiap kunjungan ia membawa serta pasukan dalam jumlah yang besar. Pada kunjungannya pada tahun 1634, ia membawa pasukan berjumlah 307.000 orang. Tujuan dari Iemitsu adalah untuk mengintimidasi kekaisaran dan memperkuat kekuasaan pemerintahan *bakufu*.

Salah satu kebijakan penting yang Iemitsu jalankan adalah politik pintu tertutup. Nakane, Totman, & Ōishi (1990) menjelaskan lebih jauh bahwa karena pemerintahan *bakufu* baru saja dengan susah payah berhasil meredam pemberontakan Shimabara setahun sebelum kebijakan ini dijalankan pada tahun

1639, politik pintu tertutup ini berkaitan erat dengan kebijakan pemerintahan *bakufu* dalam melarang menyebarnya agama Kristen.

Menurut Nakane, Totman, & Ōishi (1990) agama Kristen masuk ke Jepang pada tahun 1549 sewaktu Francis Xavier tiba di Kagoshima dan memulai tugas misionarisnya. Agama ini diterima oleh *daimyō-daimyō* di wilayah Barat, dan menyebar dengan cepat, bukan hanya karena agama ini baru, tetapi juga karena masuknya agama ini disertai dengan senapan, dan beberapa barang baru lainnya. Nobunaga secara aktif mendukung tugas para misionaris karena ia melihat agama itu sebagai alat untuk menekan kekuatan agama Buddha yang sudah tertanam dalam, dan juga karena produk-produk baru yang dibawa oleh para misionaris, akibatnya agama inipun menyebar ke berbagai wilayah.

Hideyoshi meneruskan usaha Nobunaga dalam mendukung misionaris Kristen, dan hubungan yang harmonis antara pemerintahannya dan agama Kristen berlangsung untuk sementara. Kapel-kapel Kristen didirikan di kota-kota yang berada dibawah kekuasaan *daimyō* wilayah Barat, di Kyoto, dan juga di Azuchi. Dan menurut pernyataan dari Nakane, Totman, & Ōishi (1990) dapat diketahui bahwa beberapa *daimyō* menjadi penganut agama Kristen, termasuk didalamnya Ōtomo Yoshishige, Ōmura Sumitada, Konishi Yukinaga, dan Takayama Ukon. Akan tetapi, ketika Hideyoshi masuk ke Kyoto untuk melancarkan serangannya melawan Shimazu, ia ditentang oleh banyak penganut agama Kristen di daerah itu. Kepercayaan bahwa Yesus Kristus lebih berkuasa dibandingkan apapun bahkan pemersatu seluruh negeri sekalipun dianggap Hideyoshi sebagai penghalang dalam mewujudkan rencananya. Akhirnya ia mengeluarkan perintah agar para misionaris segera keluar dari Jepang pada tahun 1587. Akan tetapi peraturan ini tidak mengatur mengenai perdagangan dengan negara luar, dan secara kenyataanya tidak ada usaha yang sungguh-sungguh dalam mengusir para misionaris, sehingga peraturan ini terbukti tidak efektif.

Dalam bukunya Nakane, Totman, & Ōishi (1990) mengemukakan bahwa Ieyasu sadar bahwa keuntungan dari perdagangan dengan luar negeri akan sangat menguntungkan Jepang dan mendukung perdagangan ini setelah tahun 1600. Pada saat itu perdagangan umumnya dilakukan oleh pedagang Portugis yang menganut agama Katolik yang memiliki ikatan yang kuat dengan keluarga Toyotomi dan

daimyō di wilayah Barat Jepang. Agar dapat menyaingi kelompok-kelompok tersebut, Ieyasu mencoba untuk berdagang dengan para pedagang dari Inggris dan Belanda yang merupakan penganut agama Protestan dan kemudian menempatkan seorang pedagang Inggris yang bernama William Adams, dan seorang pedagang Belanda bernama Jan Joosten van Lodensteijn, sebagai penasehat. Orang-orang Jepang pada saat itu juga secara aktif terlibat didalam perdagangan dengan negara luar, Ieyasu kemudian mengeluarkan Izin Segel Merah sebagai tanda izin bagi pedagang Jepang untuk berdagang ke luar negeri. Beberapa pihak yang mendapatkan izin ini antara lain adalah beberapa *daimyō* seperti Shimazu, Matsuura, Arima, dan Nabeshima, seluruh Kyushu. Tetapi kemudian Ieyasu membatasi pengeluaran izin ini hanya untuk pedagang-pedagang yang memiliki ikatan dengan keluarga Tokugawa.

Nakane, Totman, & Ōishi (1990) mengemukakan bahwa perdagangan dilakukan di banyak tempat, termasuk di Hirado, sebuah kota kastil dibawah kekuasaan klan Matsuura, tetapi pada tahun 1635, ketika Iemitsu memegang kekuasaan, perdagangan dibatasi hanya di satu pelabuhan saja, Nagasaki, yang berada di bawah kendali langsung pemerintahan *bakufu*. Dalam waktu yang bersamaan, Iemitsu melarang perdagangan ke luar negeri dan perjalanan ke luar negeri oleh orang Jepang. Sementara itu, para orang asing berada di bawah pengawasan yang ketat: pada tahun 1624 pedagang Spanyol dilarang masuk ke Jepang, dan pada tahun 1639 Iemitsu melarang pedagang Portugis masuk ke Jepang. Pedagang Inggris mundur secara sukarela sehingga yang tersisa dan diizinkan di Jepang hanya pedagang dari Belanda.

Situasi ini dikenal sebagai politik pintu tertutup, atau *sakoku*, akan tetapi hal ini bukan berarti Jepang benar-benar terisolasi dari dunia luar. Hal ini berarti: (1) Perdagangan dengan Eropa dan Cina dibatasi hanya di pelabuhan Nagasaki dimana pemerintahan *bakufu* yang secara langsung mengaturnya, dan (2) Pedagang asing yang boleh datang ke Jepang hanya pedagang dari Belanda dan dari Cina. Pemerintahan *bakufu* kemudian memonopoli perdagangan dengan negara luar, dan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, arus perdagangan dengan negara luar semakin besar sejak dijalankannya politik pintu tertutup. Sebagai ganti diizinkan berdagang di Jepang, Belanda memberikan laporan

tahunan mengenai keadaan di dunia luar. Dengan kata lain kebijakan *sakoku* ini dijalankan agar pemerintahan *bakufu* dapat memonopoli perdagangan dengan luar negeri dan juga informasi mengenai dunia luar.

Bagaimanakah hubungan politik *sakoku* dengan pelarangan agama Kristen? Menurut Nakane, Totman, & Ōishi (1990) pada tahun 1587, Hideyoshi mengeluarkan peraturan mengenai pengusiran para misionaris agama Kristen, akan tetapi karena ia menganggap perdagangan dengan luar negeri penting, ia tidak melakukan tindakan yang tegas untuk mengusir para misionaris. Ieyasu juga lebih mementingkan perdagangan dibandingkan agama Kristen. Akan tetapi diperkirakan ada sekitar 700.000 orang yang berpindah agama menjadi agama Kristen pada abad ke tujuh belas, dan ia mulai khawatir apabila situasi ini berlanjut terus, peristiwa pemberontakan seperti pemberontakan *Ikkō* akan terulang kembali. Pada tahun 1612 ia mengeluarkan perintah pelarangan menyebarkan agama Kristen dan berusaha untuk memusnahkan agama Kristen di negara Jepang. Ia memulai usahanya ini diawali dengan penghancuran seluruh kapel yang berada di Kyoto, kemudian memerintahkan *daimyō* beragama Kristen, Arima Harunobu untuk melakukan *seppuku* atau *harakiri* (bunuh diri), dan mengasingkan Takayama Ukon. Ia kemudian menangkap seluruh penganut agama Kristen dan memaksa mereka untuk meninggalkan agamanya. Yang menolak langsung dihukum mati. Banyak orang Kristen yang ikut berperang dipihak Toyotomi yang kalah pada peperangan musim dingin dan musim panas di istana Osaka, dan Hidetada memperluas perlakuan ini ke berbagai wilayah pada tahun 1620-an. Dua orang sejarawan yang bernama Dodd & Richmond (2001) menulis dalam bukunya bahwa kemudian pada tahun 1637 sebuah pemberontakan rakyat jelata terjadi di Shimabara dan Amakusa. Diantara para pemberontak banyak yang merupakan penganut agama Kristen, jadi dapat disimpulkan pemberontakan Shimabara merupakan pemberontakan orang-orang yang menganut agama Kristen. Setelah pemberontakan ini berhasil diredam, kebijakan memburu para penganut agama Kristen diperbaharui. Tetapi Nakane, Totman, & Ōishi (1990) menyatakan bahwa tidak hingga 30 tahun setelah pemberontakan Shimabara kebijakan *shumon aratame-chō* (pendaftaran agama) diinstitusikan diseluruh negeri. Yang fungsinya untuk mencari penganut Kristen dan mencegah menyebarnya agama Kristen.

Kebijakan ini mengharuskan setiap rumah tangga untuk menganut salah satu sekte agama Budha, dan mendaftarkan keluarganya ke kuil setempat.

Sebagai langkah terakhir untuk memastikan kekuasaan Tokugawa, Iemitsu mensakralkan Ieyasu. Ia menghargai kakeknya dan menghormatinya seperti dewa karena Ieyasu-lah yang memastikan kedudukannya sebagai *shogun*. Sebagai wujud penghargaannya, ia membangun kembali sebuah kuil kecil di Nikkō yang dibangun ayahnya, Hidetada untuk mensakralkan Ieyasu. Hasilnya adalah bangunan yang sangat megah dan mewah yang masih bertahan hingga sekarang. Nakane, Totman, & Ōishi (1990) menjelaskan bahwa untuk pembangunan kembali kuil ini, Iemitsu menghabiskan emas sebanyak 570.000 *ryō*¹², perak sebanyak 100 *kan*¹³, dan 1000 *koku* nasi, kemudian tenaga kerja yang digunakan diperkirakan sampai 4.534.000 orang per hari. Menurut Nakane, Totman, & Ōishi (1990) pada tahun 1645, sesuai permintaan Iemitsu, kekaisaran memindahkan kuil Ieyasu di Nikkō dan sejak saat itu disebut dengan nama Nikkō Tōshōgu.

3.3 Sistem Pemerintahan

Menurut pengurutan sejarah yang dilakukan oleh Nakane, Totman, & Ōishi (1990) sejarah pemerintahan *Bakufu* Tokugawa dapat dibagi menjadi tiga periode menurut struktur pemerintahannya: (1) dari tahun 1603 sampai 1632; (2) dari tahun 1633 sampai 1854; dan (3) dari tahun 1855 sampai 1867. Periode pertama dimulai sejak Ieyasu mendirikan pemerintahan *bakufu* hingga meninggalnya Hidetada. Periode ini adalah periode dimana urusan pemerintahan diatur dengan perintah langsung oleh orang-orang yang sangat berbakat yang berada di dalam lingkaran rezim pemerintahan Ieyasu dan Hidetada. Diantaranya antara lain ayah dan anak, Honda Masanobu dan Masazumi, dan pendeta Budha Tenkai dan Konji'in Suden. Didalamnya juga ada seorang pedagang, Chaya Shirōjirō yang telah mendukung Ieyasu sejak Ieyasu masih seorang *daimyō* di wilayah Mikawa. Bahkan seorang navigator Inggris, William Adams (Miura Anjin), yang memiliki

¹² *Ryō* adalah koin emas yang dipakai uang pada masa pemerintahan Tokugawa, 1 ryo bisa buat beli 1 koku beras, kl dengan mata uang sekarang 1 koin emas ryo antara 400 - 600 dolar. Dikutip dari Kasaya, 2000, halaman 57.

¹³ *Kan* adalah satuan berat yang biasa digunakan transaksi uang di Jepang. 1 *kan* = 3,75kg. Dikutip dari Kaempfer & Bodart-Bailey, 1999, halaman 445.

kedudukan sebagai penasehat kebijakan luar negeri Ieyasu dapat dimasukkan kedalam lingkaran ini.

Iemitsu-lah yang kemudian mengubah susunan pemerintahan ini menjadi sistem yang lebih biasa, yang menandai dimulainya periode kedua. Nakane, Totman, & Ōishi (1990) menjelaskan bahwa Iemitsu menjadi *shogun* pada tahun 1623 tetapi ayahnya masih menjalankan pemerintahan dari balik layar sebagai *shogun* yang sudah pensiun, sehingga Iemitsu pada saat itu belum bisa menjalankan kebijakan-kebijakan yang ia inginkan, hingga akhirnya ayahnya meninggal pada tahun 1632.

Kedudukan paling atas di dalam struktur pemerintahan ditempati oleh *rōju* (Penasehat Senior) dan membawahi langsung *wakadoshiyori* (Penasehat Junior). Menurut data yang diperoleh dari Nakane, Totman, & Ōishi (1990) pada tahun 1634, mendefinisikan batas kekuasaan dan fungsi mereka, dengan sepuluh pasal untuk penasehat senior dan tujuh pasal untuk penasehat junior. Menurut peraturan ini penasehat junior bertugas untuk mengawasi dan mengatur *hatamoto* dan *gokunin* (Pengikut *keshogunan* yang memiliki pendapatan kurang dari 10,000 *koku*), dan penasehat senior bertugas untuk mengawasi dan mengatur para *daimyō* (tuan tanah yang memiliki pendapatan lebih dari 10.000 *koku*), urusan luar negeri, dan masalah keuangan. Dan posisi *tairō* (Penasehat Utama) fungsinya baru didefinisikan pada tahun 1638 dan kedudukan ini diberikan kepada penasehat senior, Doi Toshikatsu dan Sakai Tadakatsu. Tugas mereka adalah hanya untuk datang ke kastil *shogun* pada tanggal 1 dan 15 setiap bulan. Dan apabila ada masalah yang serius bagi negara mereka harus hadir di kastil dan merundingkan permasalahan tersebut dengan para penasehat senior.

Badan pemerintahan yang mengerjakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari dibawah pengawasan *rōju* adalah para *sanbugyō* (tiga hakim/juri); yang merupakan badan pemerintahan yang mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan kuil, keuangan, dan mengatur keamanan kota. Menurut buku yang ditulis oleh Nakane, Totman, & Ōishi (1990) tugasnya sebagai pengurus masalah yang berkaitan dengan kuil dijalankan pertama kali pada tahun 1635 ketika hakim-hakim yang ditunjuk saat itu adalah Andō Shigenaga, Matsudaira Katsuoka, dan Hori Toshihige diperintahkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara

kuil-kuil yang berada di sekitar Edo. Nakane, Totman, & Ōishi (1990) lalu juga menjelaskan bahwa beberapa kota yang berada dibawah pemerintahan *bakufu*, seperti Osaka, Nara, dan Yamada, diurus oleh hakim (*machi bugyō*), dan hakim pertama di Edo ditunjuk pada tahun 1631 ketika Kaganouri Tadasumi dan Hori Naoyuki ditugaskan diwilayah Utara dan Selatan kota Edo.

Tugas utama dari pengurus bidang keuangan adalah penarikan pajak, dan pengaturan pengeluaran. Berdasarkan buku yang ditulis Nakane, Totman, & Ōishi (1990) dapat diketahui bahwa tugas-tugas itu pada awal pemerintahan *bakufu* baru dibentuk dijalankan oleh Ina Tadatsugu dan Ōkubo Chōan. Baru pada tahun 1633, diciptakanlah sebuah posisi khusus didalam pemerintahan untuk mengurus masalah-masalah keuangan didalam pemerintahan Bakufu.

Ōmetsuke (badan pengawas) merupakan posisi yang penting didalam pemerintahan, yang tugasnya adalah untuk menyelidiki kesetiaan seseorang kepada keluarga Tokugawa dan juga mengevaluasi pejabat-pejabat *bakufu*. Nakane, Totman, & Ōishi (1990) menulis dalam bukunya bahwa posisi ini diciptakan pada tahun 1632, ketika Yagyū Munetsune, instruktur pedang *shogun*, dan dua orang lainnya diberikan posisi tersebut, ketiga hakim terdiri atas para anggota senior *hyōjōsho*, para hakim, yang dilembagakan pada tahun 1635. Ketiganya disusun menjadi badan kehakiman, pejabat-pejabat ini menjadi badan kekuasaan hukum paling tinggi didalam pemerintahan *bakufu*, yang juga mempelajari dan membuat perencanaan mengenai masalah-masalah yang ada di dalam pemerintahan *bakufu*.

Selain badan hukum resmi ini, ada juga kelompok yang dibuat untuk mengurus kehidupan sehari-hari shogun yang bernama *Ōoku*, dan yang menciptakan kelompok ini adalah Kasuga no Tsubone, ibu menyusui yang telah merawat Iemitsu sejak kecil.

Menurut Nakane, Totman, & Ōishi (1990) bentuk pemerintahan seperti inilah yang berhasil mempertahankan kekuasaan Pemerintahan Bakufu Tokugawa selama 220 tahun hingga tahun 1854 hingga akhir pemerintahan Iemitsu. Fase akhir pemerintahan Bakufu disebabkan oleh runtuhnya sistem politik pintu tertutup, yang telah dijadikan hukum. Keruntuhan sistem politik ini disebabkan karena munculnya kebijakan untuk membuka kembali pelabuhan-pelabuhan untuk

kapal-kapal negara luar karena tekanan yang keras dari pihak negara luar. Pada saat itu, pemerintahan *bakufu* tidak mendapatkan ancaman militer yang berarti baik dari dalam maupun dari luar negeri, sehingga sistem militer mereka pada saat itu terbengkalai. Jepang saat itu juga tidak memiliki badan pemerintahan yang mengatur relasi dengan luar negeri. Dengan dibuka kembalinya pelabuhan-pelabuhan Jepang bagi kapal negara luar, pemerintahan *bakufu* mencoba untuk mengatasi keadaan ini dengan menambah badan-badan pemerintahan yang mengatur permasalahan militer dan urusan dengan negara luar. Usaha ini antara lain dengan mengadakan pendidikan militer, pembuatan kapal perang, dan relasi dengan negara asing. Walaupun pemerintahan *bakufu* telah berusaha untuk mendirikan badan-badan pemerintahan ini, mereka tidak berhasil mengimbangi perubahan zaman dan runtuh kurang dari lima belas tahun.

3.4 Kemampuan Sistem Tokugawa dalam Mengatasi Permasalahan

Sistem pemerintahan yang berada dibawah kekuasaan Iemitsu yang kemudian mempertahankan rezim pemerintahan Tokugawa, memiliki beberapa ciri-ciri khusus. Yang paling terlihat jelas adalah sistem pangkat yang tersusun atas dasar kedudukan sosial orang-orang yang memiliki pangkat tersebut. Sebagai tambahan, kebanyakan posisi di pemerintahan diduduki lebih dari satu pejabat.

Di dalam masyarakat modern, pekerjaan seseorang dan pendapatannya dipengaruhi oleh kemampuan dan kecenderungan dari orang itu sendiri, akan tetapi pada periode samurai-Tokugawa yang susunan masyarakatnya berdasarkan oleh status, pekerjaan dan pendapatan seseorang tidak didasari oleh kemampuannya, tetapi oleh kedudukan keluarga (*ie*) seseorang. Istilah *ie* ini tidak hanya mewakili rumah tempat dimana keluarga itu tinggal, akan tetapi juga mewakili status sosial dan martabat keluarga itu didalam masyarakat yang diukur berdasarkan jasa leluhurnya kepada keluarga Tokugawa. Sebagai contoh, seseorang dapat memperoleh pekerjaan sebagai hakim kota atau pengurus keuangan apabila dia lahir dari keluarga *hatamoto* dimana pendapatannya 3000 *koku* atau lebih. Apakah seseorang berbakat atau beruntung bukan merupakan faktor yang penting.

Banyaknya kritik yang muncul akibat sistem sosial yang berdasarkan status seperti ini adalah hal yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi harus diakui bahwa dengan sistem *bakuhan* yang dijalankan oleh pemerintahan *bakufu* ini, kestabilan nasional pada saat itu tetap terjaga. Dengan fakta ini, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa keberhasilan sistem pemerintahan *bakufu* Tokugawa dalam mempertahankan kestabilan nasional selama 250 tahun diakibatkan karena dipertahankan sistem jabatan yang berdasarkan kedudukan sosial ini? Jawabannya tidak. Bahkan penyusunan kembali posisi di dalam pemerintahan sering terjadi.

Apabila kita membuat grafik untuk para pengikut *bakufu*, kita dapat menemukan suatu keadaan yang alamiah, apabila sebuah keluarga berhasil menaiki tangga kedudukan sosial, maka semakin sedikitlah keluarga yang kedudukannya sama dengan keluarga itu, sehingga semakin tingginya suatu jabatan atau kedudukan, semakin sedikit pula kandidat yang dapat dipilih, sederhananya, semakin tinggi suatu jabatan, semakin dikit pula orang-orang yang berbakat yang dapat dipilih untuk menduduki posisi tersebut. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran utama pemerintahan *bakufu* dan hal ini diatasi dengan diabsolutkannya kekuasaan shogun untuk mempromosikan atau mempekerjakan orang-orang yang memiliki kemampuan. Serendah apapun kedudukan sosial keluarga seseorang, selama dia mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari *shogun*, ia bisa mendapatkan jabatan yang lebih daripada penasihat senior dan penasihat junior. Praktek ini mengisi kekosongan yang mengompensasikan keutuhan pemerintahan yang berbasis sistem pemerintahan status. Tsunayoshi, yang merupakan *shogun* kelima, yang menanamkan praktek ini ke dalam sistem politik.

Nakane, Totman, & Ōishi (1990) menulis dalam bukunya bahwa anak Iemitsu yang ketiga, Tsunayoshi, lahir pada tahun 1646 dan meninggal pada tahun 1709. Kakaknya, Ietsuna menjadi *shogun* keempat pada tahun 1651, tetapi dia tidak banyak memberikan kontribusi untuk pemerintahan, dan ketika dia meninggal pada tahun 1680, Tsunayoshi mewarisi kedudukan shogun. Ketika pertanyaan mengenai pewarisan jabatan *shogun* muncul, terjadi perdebatan yang serius di dalam lingkaran pemerintahan *bakufu*. Sewaktu Ietsuna berkuasa, Iemitsu baru saja mengatur sistem pemerintahan berdasarkan status yang berjalan

dengan lancar, dengan di bawah pengaturan Sakai Tadakiyo dan lainnya yang pada saat itu menjabat sebagai penasihat utama (senior). Keluarga orang-orang ini menikmati kedudukan sebagai *daimyō fudai*, yang merupakan kehormatan paling tinggi diantara pengikut *shogun*. Pada saat itu, mereka merencanakan untuk mempertahankan sistem pemerintahan yang berdasarkan status dan membuat pemerintahan *bakufu* berada di bawah kekuasaan *daimyō fudai* dengan cara membuat seorang pangeran kekaisaran menjadi pewaris Ietsuna. Hotta Masatoshi, yang baru saja ditunjuk menjadi pengawas senior di tahun sebelumnya, adalah satu-satunya yang berpendapat dengan teguh bahwa seharusnya Tsunayoshi lah yang menjadi *shogun* karena dia adalah garis keturunan langsung dari keluarga Tokugawa. Para penasihat gagal untuk menyatukan pendapat mereka, dan Tsunayoshi mewarisi kedudukan *shogun* sesuai dengan surat wasiat yang ditinggalkan Ietsuna.

Hal yang pertama yang dilakukan Tsunayoshi adalah membuat sebuah posisi di dalam pemerintahan yang disebut dengan *katte-gakkari rōju*. *Katte* berarti dapur, dan arti yang lebih luasnya adalah urusan keuangan. Jadi *katte-gakkari rōju* berarti seorang penasihat senior yang bertanggung jawab atas urusan finansial. Jumlah penasihat senior 4 orang, dan sejauh itu keempat orang ini yang mengurus urusan politik pemerintahan *bakufu* dengan saling berdiskusi. Tsunayoshi memiliki pendapat bahwa seharusnya kepengurusan finansial harus dipertimbangkan untuk jangka panjang dan salah satu pejabat harus memiliki tanggung jawab penuh pada urusan finansial ini. Dia kemudian mensahkan posisi *katte-gakkari rōju* dan memberikan tanggung jawab kepada orang yang memiliki posisi itu terhadap seluruh urusan ekonomi dan fiskal. Ia kemudian menyerahkan tugas ini kepada Hotta Masatoshi yang dulu membantunya berhasil untuk mendapatkan posisi sebagai *shogun*. Tetapi menurut data yang diperoleh dari Nakane, Totman, & Ōishi (1990) dapat diketahui bahwa pada tahun 1684 Hotta dibunuh di dalam kastil oleh seorang penasihat junior, dan Tsunayoshi mengalihkan tugas ini pada *soba-yōnin seiji* (asisten pribadi *keshogunan*). *Soba-yōnin* adalah orang-orang yang mengurus kebutuhan pribadi *shogun* (*sobashu*) dan juga bertugas sebagai teman berdiskusi. *Sobashu* ini tidak memiliki wewenang untuk mengurus urusan politik, akan tetapi *soba-yōnin* yang selalu

berada di sisi shogun bertugas sebagai pengantar pesan yang menyampaikan pandangan politik shogun kepada penasihat senior dan menyampaikan laporan para penasihat kepada shogun.

Setelah kematian Hotta, Makino Narisada dan kemudian Yanagisawa Yoshiasu yang meneruskan tugasnya dan menjalankan perintah Tsunayoshi. Yanagisawa adalah anak seorang pejabat keuangan minor yang bekerja kepada Tsunayoshi ketika ia masih menjadi *daimyō* di wilayah Tatebayashi di provinsi Kōzuke. Apabila dilihat dari martabatnya, kehidupan keluarganya tidak mendukung kualifikasi Yoshiasu untuk posisi tinggi dalam pemerintahan, tetapi hubungan pribadinya dengan *shogun* membuatnya menjadi mungkin.

Pengaturan seperti ini dimana orang seperti Yanagisawa yang tidak memiliki kedudukan sosial tinggi, tetapi menikmati kepercayaan dari *shogun*, membutuhkan kekuatan yang besar untuk melebihi penasihat senior dan junior yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan mengurus urusan politik. Hal ini disebut dengan *soba-yōnin seiji* atau pemerintahan oleh asisten pribadi. Pola pengaturan seperti ini berlanjut selama pemerintahan *shogun* keenam dan ketujuh, Ienobu dan Ietsubu, ketika Manabe Akifusa dan Arai Hakuseki menjabat sebagai asisten yang berpengaruh sewaktu pemerintahan Yoshimune, Arima Ujinori dan Kanō Hisamichi menjalankan tugas itu, serta Ōoka Tadimitsu dan Tanuma Ogitsubu juga menjalankan tugas itu yang diwariskan oleh pendahulunya, Ieshige dan Ieharu. Manabe adalah bekas aktor Noh dan Arai adalah seorang pelajar Konfusius. Arima dan Kanō merupakan pengikut Yoshimune sejak Yoshimune menjadi penguasa Kishu. Ōoka Tadimitsu berasal dari cabang keluarga Ōoka dan Tanuma merupakan anak seorang prajurit infantri (*ashigaru*) di wilayah Kishu.

Dengan penjelasan yang telah tertulis di atas, kita dapat mengetahui apa saja peran dan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Tokugawa Ieyasu dalam mempertahankan kekuasaannya, sampai keturunan-keturunannya yang menerapkan kebijakan Ieyasu dalam memerintah. Hal inilah yang perlu diperhatikan karena memiliki peran besar yang menyebabkan klan Tokugawa dapat berkuasa sampai 262 tahun lamanya.